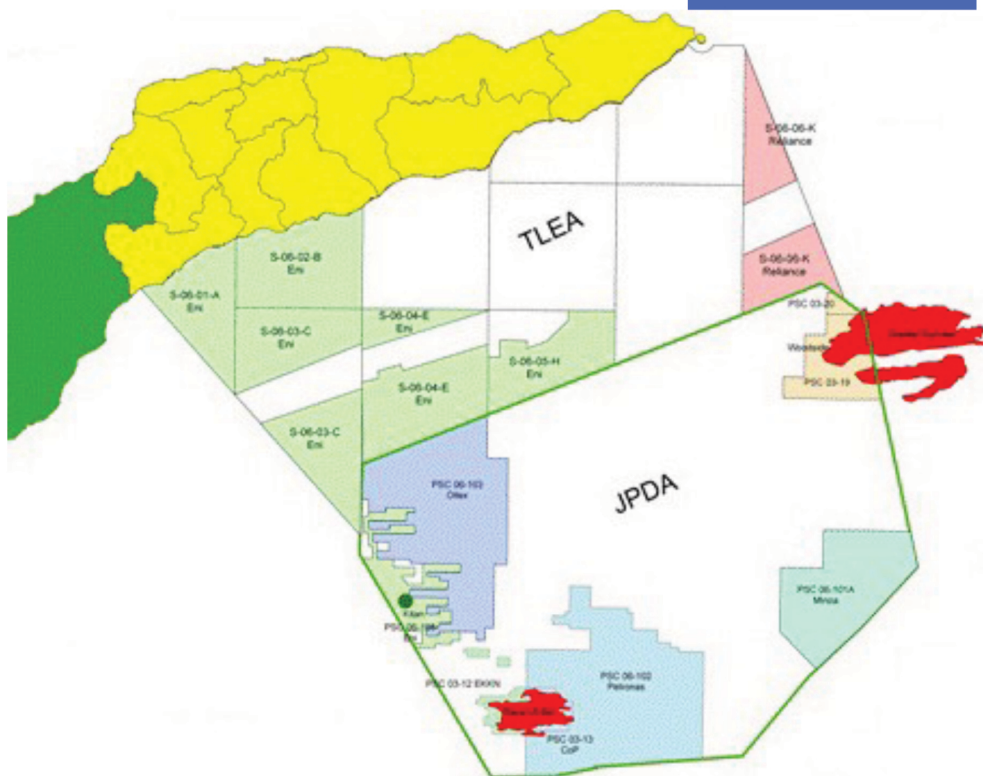


TL-EITI

**Timor-Leste
Extractive
Industry
Transparency
Initiative**



Inisiatif Transparansi Industri Extractives Timor-Leste

Sekretariat Negara urusan Sumber Daya Alam

Republik Demokratik Timor-Leste

31 Desember 2009

**BAHASA :
INDONESIA**

LAPORAN EITI TIMOR-LESTE (EXTRACTIVE INDUSTRY TRANSPARENCY INITIATIVE)

31 Desember 2009

Daftar isi

Pesan dari Bapak Alfredo Pires – Sekretaris Negara	1
Sumber Daya Alam	2
Definisi	7
1 LAPORAN KELOMPOK KERJA EITI	7
1.1 Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif	7
1.2 Kelompok Kerja EITI Timor-Leste	7
1.3 Pedoman Laporan EITI Timor-Leste	8
1.4 Ruang Lingkup	10
1.5 Aturan Akuntansi	10
1.6 Contoh dari Manfaat pengaliran	11
1.7 Badan agregasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009	13
1.8 Validasi EITI Timor-Leste	13
1.9 Industri Minyak di Timor-Leste	13
1.10 Rezim Fiskal dan Legal untuk Minyak di Timor-Leste	14
1.11 Pendapatan Minyak	15
1.12 Rekonsiliasi Penerimaan Dana Minyak untuk Laporan EITI	19
2 Sejarah terkini tentang EITI di Timor-Leste	21
LAMPIRAN A – Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif	22
Prinsip-Prinsip dan Kriteria EITI	24
Validasi EITI	27
LAMPIRAN B – Validasi EITI Timor-Leste	29
3 PENILAIAN UMUM	30
LAPORAN BADAN AGREGASI – Kompilasi Laporan dan	
Pernyataan Rekonsiliasi	32
Laporan Kompilasi Badan Agregasi	34
Lampiran Rekonsiliasi	36

Pesan dari Bapak Alfredo Pires Sekretaris Negara Sumber Daya Alam

Untuk kedua kalinya Laporan TL-EITI 2009 kembali mendapat pengakuan Internasional atas sistem akuntabilitas keuangan petroleum yang solid dan transparan. Pengakuan Internasional tersebut tercermin dalam penghargaan yang telah diberikan kepada Timor-Leste terkait dengan sistem transparansi, antara lain:

Pada Tahun 2010 Revenue Watch Index tentang transparansi disektor petroleum menempatkan Timor Leste pada posisi ke-12 setelah **USA yang berada diposisi 11**.

Di Tahun 2010 Timor-Leste diakui sebagai Negara kompliant, dan menduduki posisi pertama (I) di Asia dan posisi ketiga (III) didunia.

Tahun tersebut Timor Leste melampaui 19 negara dalam rangking Transparency International Corruption Index.

Dalam Laporan TL-EITI 2008 yang menunjukkan tidak Adanya '**se-cent dollar**' pun hilang dari pendapatan sektor petroleum Timor-Leste, yang menjadi paradigma bagi penempatan Timor Leste di posisi terhormat dalam pergaulan Internasional sebagai Negara yang 'transparan' dan berdedikasi di bidang akuntabilitas pendapatan sektor petroleum.

Misi kita dalam lima(5) tahun mendatang, kita dapat mempertahankan penghargaan tersebut, dan juga membudayakan transparansi bagi seluruh Masyarakat Timor-Leste.

Sekali lagi, Selamat untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Laporan EITI 2009, dan juga NGO serta perusahaan Internasional yang sedang beroperasi di Timor-Leste.



Alfredo Pires

Alfredo Pires
Sekretaris Negara Sumber Daya Alam

Definisi

Istilah	Definisi
Laba Tambahan Pajak	Tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang oleh Kontraktor yang memiliki jumlah positif dari penerimaan bersih yang diakumulasikan berasal dari proyek Bayu Undan untuk tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pajak Kontraktor Bayu Undan Undang-Undang (Timor-Leste, 2003)
Badan Koleksi	Pihak ketiga yang independen yang bertanggung jawab untuk mengoleksi dan menganalisis <i>Template</i> Pelaporan yang diajukan oleh Perusahaan dan Pemerintah.
Autoridade Nacional do Petróleo (ANP)	Badan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kegiatan perminyakan di daerah yurisdiksi eksklusif Timor-Leste dan di JPDA sesuai dengan UU tentang pembentukan ANP, Perminyakan Timor-Leste Hukum Kegiatan, dan Perjanjian Laut Timor. Untuk tujuan pengembalian, semua pembayaran yang dilakukan oleh Industri Ekstraktif ke ANP dianggap sebagai pembayaran kepada Pemerintah Timor-Leste
Biaya pendaftaran	Biaya yang akan diajukan dengan aplikasi untuk PSC.
Pasal 6.1 (a)	Sebagai didefinisikan dalam Undang-Undang Dana Minyak.
Pasal 6.1 (b)	Sebagai didefinisikan dalam Undang-Undang Dana Minyak.
Pasal 6.1 (d)	Sebagai didefinisikan dalam Undang-Undang Dana Minyak.
Pasal 6.1 (e)	Sebagai didefinisikan dalam Undang-Undang Dana Minyak.
Manfaat Aliran	Suatu Sumber potensi dari manfaat ekonomi Pemerintah menerima dari industri ekstraktif, seperti dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 8.
Cabang Laba Pajak	Seperti didefinisikan dalam undang-undang atau perpajakan JPDA Timor-Leste yang relevan JPDA.

Istilah	Definisi
Perusahaan	Setiap entitas perusahaan yang diterbitkan dengan izin untuk terlibat dalam Industri Ekstraktif oleh Pemerintah.
Kerahasiaan	Semua informasi yang diberikan pada template laporan harus diperlakukan secara rahasia dan hanya untuk penggunaan Badan Koleksi dan Pemerintah semata-mata untuk keperluan persyaratan laporan EITI; tak ada informasi yang harus diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan itu, kecuali pengungkapan yang diharuskan oleh hukum.
Sistem Kontrak	Dalam Sistem Kontrak perjanjian antara kontraktor dan Pemerintah ada dimana kontraktor menanggung semua biaya eksplorasi dan risiko serta pengembangan dan biaya produksi dengan imbalan yang ditetapkan bagian dari produksi yang dihasilkan dari upaya ini. Secara umum, pemerintah tetap mempertahankan kepemilikan dari setiap hidrokarbon atau cadangan mineral.
Negara	Batas teritorial Negara dimana telah dikendalikan Pemerintah atau pengendalian bersama.
Dana Pembangunan	Akan berlaku pada saat suatu penemuan komersial dinyatakan oleh kontraktor. Biaya berdasarkan ukuran penemuan minyak dan cadangan gas.
Ekuitas Saham	Persentase kepentingan ekonomi yang diperoleh dari manfaat konsesi Perusahaan, atau ijin operasi,
Industri Ekstraktif	Industri Ekstraktif adalah industri-industri yang terlibat dalam menemukan dan mengalihkan sumber daya alam yang tidak diperbaharui yang terletak di atau dekat kerak bumi. Merusak sumber daya alam adalah sumber daya yang tidak dapat diganti keadaan aslinya oleh manusia.
Pembayaran Tranche Pertama	Suatu pembayaran produksi yang dibuat berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dibuat antara Pemerintah Timor-Leste dan Perusahaan yang berkaitan dengan penjualan kondensat, LPG atau Gas Bumi.
Pemerintah	Rezim Pemerintah dan lembaga-lembaga Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste di mana batas-batas

Istilah	Definisi
	<p>territorial perusahaan dalam Industri Ekstraktif beroperasi.</p> <p>Termasuk Pemerintah lokal, regional, negara dan perwakilan federal dari rezim dan lembaga-lembaga dan entitas yang dikendalikan oleh rezim dan lembaga tetapi tidak termasuk Perusahaan Milik Negara.</p>
Hak Produksi Pemerintah	<p>Hidrokarbon atau mineral yang telah diproduksi Pemerintah berhak atas cadangan mineral / deposit di bawah sistem kontrak. Di bawah sistem konsesi pemerintah tidak akan memiliki hak produksi.</p>
Pajak Penghasilan	<p>Pajak penghasilan yang berlaku di Timor-Leste dibawah regulasi UNTAET No. 1999/1.</p>
Perusahaan Internasional	<p>Untuk keperluan pedoman ini, sebuah Perusahaan Internasional meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Negara dan swasta yang berada di Aliran Kegiatan Industri Ekstraktif • Perusahaan Milik Negara yang beroperasi di luar batas-batas wilayah Pemerintah yang mengontrol mereka.
Perusahaan Patungan	<p>Sebuah perusahaan yang terlibat dalam perusahaan patungan. Perusahaan patungan melibatkan perjanjian kontrak bergabung bersama dua atau lebih pihak untuk tujuan menjalankan suatu usaha bisnis tertentu. Semua pihak sepakat untuk berbagi dalam keuntungan dan kerugian dari perusahaan.</p>
Lisensi	<p>Suatu pengaturan antara perusahaan Industri Ekstraktif dan Pemerintah mengenai wilayah geografis atau geologi yang spesifik dan operasi mineral terkait lainnya. Untuk keperluan Pedoman Pelaporan Lisensi istilah juga digunakan untuk menentukan izin, posisi areal, sebuah wilayah kontrak, sewa atau blok.</p>
Biaya Lisensi	<p>Suatu biaya yang dikenakan sehubungan dengan lisensi.</p>
Direktorat Nasional Pendapatan	<p>Direktorat Nasional Pendapatan Minyak bertanggung jawab untuk mengelola semua pembayaran pajak Minyak di daerah yang dicakup oleh Joint Petroleum</p>

Istilah	Definisi
Minyak (NDPR) (Dahulu Divisi Pajak Minyak)	Development Area (JPDA) di Laut Timor dan Timor - Leste yang terkait dengan kegiatan minyak di darat atau lepas pantai . NDPR ini sebelumnya disebut sebagai Divisi Pajak Minyak (DPM). Lampiran dan Pedoman ini mengacu pada DPM.
Perusahaan Nasional Milik Negara	Perusahaan dikendalikan oleh Pemerintah yang melakukan Kegiatan Aliran Industri Ekstraktif di Timor-Leste. Saat menyelesaikan jika perusahaan dikontrol, kriteria berikut digunakan; kemampuan Pemerintah untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.
Kontrak Bagi Hasil Produksi	Sebuah kontrak antara pihak-pihak yang ada di sumur minyak dan Timor-Leste mengenai persentase produksi yang akan diterima masing-masing pihak yang berpartisipasi telah memperoleh jumlah tertentu dari biaya dan beban.
Laba Minyak & Pembayaran Gas	Pembayaran produksi yang dibuat berdasarkan Kontrak bagi Hasil yang dibuat antara Pemerintah Timor-Leste dan Perusahaan yang berhubungan dengan keuntungan atas penjualan kondensat, LPG dan gas alam.
Dispensasi Laporan	Pada dasar kebijaksanaan Badan diagregasi dapat memberikan dispensasi pada Perusahaan Internasional dari mengajukan Template Pelaporan untuk Timor-Leste di mana usaha mereka tidak signifikan. Kelompok Kerja EITI bertanggung jawab untuk menentukan kriteria dispensasi.
Entitas Laporan	Perusahaan dan Pemerintah dalam penerimaan Manfaat Pengaliran.
Pedoman Laporan	Dokumen ini, yang memberikan panduan untuk menyelesaikan Template Pelaporan ditunjukkan dalam Lampiran dari dokumen ini.
Periode Laporan	Periode laporan untuk Template Laporan adalah periode yang sejalan dengan tahun fiskal Pemerintah, 31 Desember.
Template Laporan	Template Internasional, Nasional dan Perusahaan

Istilah	Definisi
	Nasional milik Negara dan Pemerintah menyerahkan kepada badan diagregasi sebagai bagian dari tanggung jawab mereka di bawah Pedoman Pelaporan.
Biaya Permukaan	Untuk JPDA biaya layanan kontrak. Untuk Wilayah Eksklusif Timor-Leste, biaya sewa untuk area Kontrak.
Aktivitas Pengaliran	Aktivitas Pengaliran termasuk semua aktivitas yang bertalian dengan eksplorasi, pengembangan dan produksi dari aset mineral sampai pada titik di mana mineral diekstraksi dalam keadaan dapat dipasarkan tanpa proses lebih lanjut.
VAT	Berarti UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang berlaku di Timor-Leste di bawah Regulasi UNTAET No. 1999/1.
Pajak Upah	Berarti upah kurang upah bebas pajak dan segala tunjangan yang ditetapkan dalam Bagian A Pasal 5 dari Jadwal 1 di Regulasi UNTAET No. 2000/18.
Pemotongan Pajak	Sebagai didefinisikan dalam undang-undang perpajakan JPDA atau yang relevan di Timor-Leste

1. LAPORAN KELOMPOK KERJA EITI

1.1 Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) adalah standar global untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas di negara-negara kaya minyak, gas, atau sumber daya mineral. Inisiatif ini didukung oleh sebuah koalisi internasional negara-negara berkembang, donor, perusahaan-perusahaan industri ekstraktif, organisasi-organisasi masyarakat sipil, investor, dan organisasi internasional. Prinsip dan Kriteria EITI dilampirkan dalam Lampiran A.

Pemerintah Timor-Leste adalah salah satu negara pertama yang menyatakan komitmennya terhadap Prinsip dan Kriteria dari Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) pada kesempatan konferensi internasional pertama EITI di London pada bulan Juni 2003.

1.2 Kelompok Kerja EITI Timor-Leste

Kelompok kerja (“Working Group”) EITI terdiri dari anggota berikut ini;

- Sekretaris Negara, Sumber Daya Alam / Pegawai Negeri EITI *Focal Point* (Ketua)
- Dua perwakilan dari Departemen Keuangan
- Salah satu wakil dari Otoritas Perbankan dan Pembayaran (BPA)
- Dua perwakilan dari Sekretariat Negara Sumber Daya Alam
- Tiga perwakilan masyarakat sipil
- Tiga perwakilan perusahaan minyak

Sebagai bagian dari aturan internasional dan kerangka yang mendefinisikan label transparansi EITI, setiap negara kandidat harus memenuhi berbagai kriteria termasuk publikasi laporan EITI, dalam rangka mencapai status *kompliant*.

1.3 Pedoman Laporan EITI Timor-Leste

Pedoman EITI Timor-Leste EITI (“Pedoman”) memberikan arahan untuk laporan untuk badan agregasi EITI.

Pedoman ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada bagian Pemerintah dan perusahaan yang mengajukan Template Laporan ke badan agregasi EITI.

Proses keseluruhan untuk pelaporan manfaat pengaliran kepada Badan Agregasi adalah sebagai berikut:

- Tahap A: Pemerintah akan melaporkan sejalan dengan Template Laporan Pemerintah (lihat Lampiran B, C dan D);
- Tahap B: Perusahaan akan melaporkan sesuai dengan estándar Template Pelaporan Perusahaan (lihat Lampiran A); dan
- Tahap C: Badan Agregasi akan agregat dan menganalisis data diungkapkan dan menyelidiki perbedaan yang muncul.

Proses untuk menyelesaikan template

Untuk menyelesaikan proses laporan, terdapat 5 tahapan kunci yang mana Pemerintah dan perusahaan harus melakukan seperti tersebut di bawah ini. Ini termasuk referensi ke bagian terkait dengan Pedoman Laporan.

TAHAP 1: Identifikasi ruang lingkup

Entitas Laporan harus menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dicakup oleh Template Laporan, merujuk pada Bagian 3: Ruang Lingkup Laporan.



TAHAP 2: Memahami prinsip-prinsip laporan untuk aplikasi

Selanjutnya, Entitas Laporan harus memahami prinsip-prinsip laporan yang akan dilengkapi ketika melengkapi Template Laporan, merujuk pada Bagian 4: Prinsip-Prinsip Laporan.



TAHAP 3: Identifikasi manfaat pengaliran

Tahap ketiga dalam proses adalah untuk Entitas Laporan untuk mengidentifikasi manfaat pengaliran dan Pembagian Hak terkait. Ini harus dimasukkan dalam Template Laporan, merujuk pada Bagian 5: Manfaat Pengaliran



TAHAP 4: Memahami prinsip-prinsip akuntansi

Entitas Laporan harus memahami prinsip-prinsip akuntansi yang akan di aplikasikan ketika memasukkan Pembagian hak mereka pada masing-masing manfaat pengaliran dalam Template Laporan. Merujuk pada bagian 6: Prinsip-Prinsip Akuntansi.



TAHAP 5: Menyatukan, konsolidasi & mengajukan Template Laporan

Tahap terakhir adalah untuk Entitas Laporan untuk menyatukan dan konsolidasi informasi yang diperlukan sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi, merujuk pada bagian 4: Prinsip-prinsip Laporan, Bagian 6: Prinsip-prinsip Akuntansi dan lampiran E.

1.4 Ruang Lingkup Laporan

Batas-batas berikut telah ditetapkan untuk Kegiatan Pengaliran Industri Ekstraktif, dan Pemerintah untuk tujuan menentukan lingkup pelaporan menurut Pedoman Pelaporan ini.

a) Aktivitas: Industri Ekstraktif

Lihat Definisi Istilah untuk penjelasan dari Industri Ekstraktif. Untuk keperluan Pedoman Laporan, sumber daya alam yang tak diperbaharui terbatas pada:

- Bijih Logam (seperti tembaga, emas, besi, nikel, timbal, seng, timah perak, dan platinum);
- Batu permata;
- Minyak mentah (termasuk cairan gas alam dan pasir minyak);
- Gas Alam; dan
- Batubara dan industri mineral

b) Aktivitas: Kegiatan Pengaliran

Lihat definisi istilah untuk sebuah deskripsi tentang Kegiatan Pengaliran. Kegiatan Pengaliran dapat dibagi dalam tahap-tahap berikut:

Pencarian

- Perolehan hak mineral;
- Eksplorasi;
- Penilaian atau evaluasi;
- Pengembangan;
- Konstruksi (tidak harus dianggap sebagai fase terpisah dalam industri minyak dan gas);
- Produksi; dan
- Penutupan atau ditinggalkan.

1.5 Aturan Akuntansi

Ada sejumlah prinsip akuntansi utama yang harus dipertimbangkan:

Kas dasar Laporan Manfaat Pengaliran harus dilakukan secara tunai (seperti terpapar di dalam dasar akrual). Tanggal pembayaran diambil dari tanggal pada rekening bank pembayar adalah didebet. Basis kas dianggap paling tepat jika Pemerintah tidak dalam posisi untuk estimasi akrual untuk penerimaan diperkirakan akan diterima dari perusahaan. Selain itu, Pemerintah diwajibkan untuk memastikan bahwa semua data yang diungkapkan oleh perusahaan disusun sesuai dengan Standar Laporan Keuangan Internasional (IFRS).

Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan untuk Manfaat Pengaliran adalah Dolar Amerika Serikat (USD). Anda harus menggunakan kurs harian rata-rata untuk menerjemahkan USD yang diterbitkan oleh BNU pada hari pelaporan.

1.6 Contoh dari Manfaat Pengaliran

Manfaat Pengaliran	Penjelasan lebih lanjut
Hak Produksi Pemerintah	Saham pemerintah dari total produksi yang dapat ditransfer langsung ke pemerintah atau pada Perusahaan Nasional Milik Negara tunai atau dalam bentuk lain.
Hak Produksi Perusahaan Nasional milik Negara	Saham Perusahaan Nasional Milik Negara total produksi dari kepentingan ekuitas perusahaan dalam tunai atau bentuk lain.
Laba Pajak	Pajak yang dikenakan pada keuntungan Kegiatan Pengaliran suatu perusahaan.
Pembayaran tranche Pertama	Suatu pembayaran produksi yang dibuat berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dibuat antara Pemerintah Timor-Leste dan Perusahaan yang berkaitan dengan penjualan kondensat, LPG atau Gas Bumi.
Pembayaran Laba Minyak & Gas	Suatu pembayaran produksi yang dibuat berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dibuat antara Pemerintah Timor-Leste dan Perusahaan yang berkaitan dengan penjualan kondensat, LPG atau Gas Bumi.
Dividen	Dibayar untuk Pemerintah dari Perusahaan nasional milik negara mengenai saham dan setiap distribusi laba dalam bentuk apapun modal selain modal pembayaran utang atau pinjaman.
Bonus	Pembayaran termasuk: <ul style="list-style-type: none">• Penghargaan, hibah & pengalihan hak ekstraksi;• Pencapaian tingkat produksi tertentu / target; dan• Temukan cadangan mineral tambahan /

	deposito.
Biaya lisensi, biaya sewa, biaya masuk dan pertimbangan lain untuk lisensi	Pembayaran termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan / atau eksplorasi dimulai dan / atau untuk mempertahankan lisensi atau konsesi; • Melakukan pekerjaan eksplorasi dan / atau pengumpulan data; atau • <i>leasing</i> atau menyewa konsesi atau wilayah lisensi
Lain	Pajak / pungutan / biaya konsumsi seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan pribadi atau pajak penjualan.

Kategori-kategori berikut pembayaran kepada entitas Pemerintah dan entitas Pengontrol Pemerintah yang dianggap normal pembayaran bisnis rutin tidak akan dianggap sebagai manfaat pengaliran dan karena itu tidak membutuhkan laporan:

- *lisensi kendaraan*
- *Visa*
- *Kerja dan ijin tinggal*
- *Listrik*
- *Air*
- *Pembuangan Limbah*
- *Biaya berlabuh*
- *Ijin kegiatan usaha*
- *Pendaftaran bisnis / korporasi*
- *Tugas Bea cukai*
- *Sewa Properti*

1.7 Badan Agregasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009

Badan agregasi mempersiapkan pernyataan Rekonsiliasi EITI. Auditor Independen Dana Minyak dipilih sebagai Badan agregasi untuk menghindari duplikasi pekerjaan, sebagai Auditor Independen mengumpulkan informasi serupa dari Perusahaan sebagaimana diminta oleh Undang-Undang Dana Minyak.

1.8 Validasi EITI Timor-Leste

Pada bulan Maret 2010, *Coffey International Development* sebagai Validator dari proses EITI di Timor-Leste, menegaskan bahwa Timor-Leste telah memenuhi seluruh Indikator dalam Panduan Validasi dan bahwa proses EITI konsisten dengan Prinsip dan Kriteria EITI. Penilaian Keseluruhan disertakan pada Lampiran B.

- Timor-Leste telah diterima sebagai negara Kompliant EITI pada tanggal 1 Juli 2010 oleh Dewan EITI. Sesuai dengan Peraturan EITI;
- Timor-Leste harus divalidasi ulang dalam waktu 5 tahun (yaitu, tanggal 1 Juli 2015);
- Pihak berkepentingan dalam proses bisa mendapat panggilan untuk validasi baru setiap saat dalam jangka waktu tersebut jika mereka berpikir proses dibutuhkan peninjauan; dan
- Dimana ada kekhawatiran yang valid bahwa negara yang telah menjadi Kompliant EITI, tapi pelaksanaannya telah jatuh di bawah standar yang dibutuhkan untuk Kepatuhan, maka Dewan berhak untuk meminta negara itu untuk menjalani validasi baru atau mencoret muka dari EITI .

1.9 Industri Minyak di Timor-Leste

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2010, hanya Bayu Undan yang beroperasi. Bayu Undan dioperasikan oleh ConocoPhillips dan perusahaan patungan. Pada bulan April 2010, Eni telah memperoleh persetujuan untuk mulai beroperasi penuh di lapangan Kitan, dengan penerimaan diperkirakan akan mengalir ke Pemerintah awal 2011. Ada sejumlah perusahaan lain ConocoPhillips servis dan perusahaan patungan.

Saat ini, tidak ada material industri ekstraktif lainnya dari industri perminyakan sehingga laporan EITI hanya mencakup penerimaan dari industri minyak bumi.

1.10 Rezim Fiskal dan Legal untuk minyak di Timor-Leste

Sektor migas Timor-Leste beroperasi di dua wilayah hukum yang berbeda dengan hukum yang relevan dan rezim fiskal (atau pajak):

- Joint Petroleum Development Area ("JPDA"), yang dikelola bersama oleh Australia dan Timor-Leste, dan
- Area Eksklusif Timor-Leste dan prospek di daratan baik Bayu Undan dan Kitan berada dalam JPDA.

ANP Mengelola Kontrak Saham minyak

The Autoridade Nacional do Petroleo ("ANP") adalah lembaga resmi untuk mengelola kegiatan minyak bumi di JPDA dan TLEA. ANP masuk ke dalam Kontrak Minyak Bagi Hasil ("PSC") dengan perusahaan kontraktor pengembangan sumur minyak. PSC menetapkan apakah Royalti dan Laba minyak & Gas ANP akan diterima atas nama Pemerintah Timor-Leste dan Australia.

First Tranche Petroleum (FTP) dikalkulasi sebagai persentase dari penjualan BBM seperti yang ditetapkan oleh PSC. Penerimaan Laba Minyak & Gas dibagi antara perusahaan patungan dan ANP. Mengambil Laba Minyak dan Gas Bumi dikalkulasi untuk menghitung pengeluaran perusahaan patungan yang berhubungan dengan operasi minyak baik. Royalti yang dibayar oleh Operator sumur minyak. Laba Minyak & Gas dibayar oleh setiap perusahaan patungan.

ANP transfer FTP dan Laba Minyak dan Gas Bumi kepada Pemerintah Timor-Leste dan Australia sesuai dengan perjanjian Laut Timor. Berdasarkan Perjanjian Laut Timor 90% dari Royalti dan Laba Minyak yang dialokasikan ke Timor-Leste dengan sisanya 10% kepada Pemerintah Australia.

Sesuai dengan Undang-Undang Dana Minyak ANP transfer penerimaan ini untuk Dana Minyak yang dikelola oleh Otoritas Perbankan dan Pembayaran (BPA).

Direktorat Nasional Pendapatan dan Retribusi Perpajakan Minyak

Pemerintah Timor-Leste memungut pajak minyak di perusahaan minyak menurut Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Kontraktor Industri

Ekstraktif dan Jasa Perusahaan membayar pajak penghasilan, pajak keuntungan tambahan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak upah dan pajak penghasilan. Direktorat Nasional Pendapatan Minyak (dahulu Direktorat Pajak Minyak) di Departemen Keuangan mengurus pajak minyak bumi.

Biaya

Biaya Pengembangan dan biaya kontrak jasa adalah biaya-biaya yang berlaku di JPDA. Biaya lisensi / Biaya permukaan yang berlaku dalam TLEA.

1.11 Pendapatan Minyak

Pendapatan minyak total yang dibayarkan Perusahaan dan diterima oleh Pemerintah untuk tahun 2009 disajikan pada Tabel 1.

<i>Table 1. Total petroleum revenues 2009</i>			<i>US Dollars</i>
Revenue items	Paid by companies	Received by Government	Differences
Petroleum Taxes	650,220,161	650,220,161	-
FTP / Royalties / Profit Oil & Gas	1,109,024,844	1,109,024,844	-
Fees	4,644,990	4,644,990	-
	1,763,889,995	1,763,889,995	-
Petroleum taxes as % of total revenue	37%	37%	
FTP as % of total revenue	63%	63%	
Fees as % of total revenue	0.26%	0.26%	

Pajak minyak bumi dan royalti / keuntungan minyak dan gas adalah sekitar 37% dan 63% dari pendapatan minyak bumi pada tahun 2009 masing-masing. Biaya yang dibayarkan kepada ANP pada tahun 2009 adalah sebesar US \$ 4.644.990 yang merupakan 0,3% dari pendapatan minyak total selama periode pelaporan.

Pajak Minyak oleh Perusahaan

Tabel 2 mencantumkan semua Pendapatan Minyak Industri Ekstraktif yang diterima oleh Pemerintah pada tahun 2009 oleh Perusahaan:

<i>Table 2 Petroleum tax revenues 2009</i>			<i>US Dollar</i>
Name of Company	Paid by companies	Received by Government	Differences
ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd (Revised)	5,639,213	5,639,213	-
ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	85,230,527	85,230,527	-
ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	28,957,881	28,957,881	-
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	185,400,285	185,400,285	-
ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	47,971,847	47,971,847	-
Conoco Phillips (03-19) Pty Ltd (Revised)	4,480	4,480	-
PC (Timor Sea 06-102) Ltd (Revised)	3,595,515	3,595,515	-
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	72,185,360	72,185,360	-
ENI JPDA 03-13 Limited	74,673,381	74,673,381	-
ENI Timor - Leste S.P.A (PSC 1-5)	113,848	113,848	-
ENI JPDA 06-105 PTY LTD (Revised)	1,884,719	1,884,719	-
MINZA OIL & GAS LIMITED	95,684	95,684	-
Oilex (JPDA 06-103) Ltd (Revised)	10,563	10,563	-
Tokyo Timor Sea Resource Pty Ltd	64,650,319	64,650,319	-
Inpex Sahul Co. Ltd (Revised)	77,143,602	77,143,602	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 19) Pty Ltd	1,324,023	1,324,023	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 20) Pty Ltd	6,245	6,245	-
Reliance Exploration & Production DMCC	1,332,669	1,332,669	-
			-
Total	650,220,161	650,220,161	-
ConocoPhillips as % of total tax revenue	54%		

17 perusahaan industri ekstraktif membayar pajak minyak bumi kepada Pemerintah Timor-Leste pada tahun 2009. ConocoPhillips membayar 60% dari total pajak minyak bumi yang diterima oleh Pemerintah. Perusahaan patungan Eni, Inpex, Santos dan Tokyo Laut Timor membayar pajak minyak bumi yang signifikan selama periode ini.

Pembayaran Tranche Pertama dan Laba Minyak & Gas oleh perusahaan

Pembayaran Tranche minyak Pertama *The First Tranche Petroleum* (FTP) dan Laba minyak & Gas yang dibayar oleh perusahaan dan diterima oleh pemerintah dicantumkan dalam tabel 3.

<i>Table 3 FTP/Profit Oil and Gas 2009</i>			<i>US Dollar</i>
Name of Company	Paid by companies	Received by Government	Differences
ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	8,852,230	8,852,230	-
ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	151,021,834	151,021,834	-
ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	52,862,834	52,862,834	-
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	396,072,797	396,072,797	-
ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	75,055,944	75,055,944	-
ENI JPDA 03-13 Limited	108,227,122	108,227,122	-
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	107,794,679	107,794,679	-
Tokyo Timor Sea Resource Pty Ltd	90,613,101	90,613,101	-
Inpex Sahul Co. Ltd	118,524,303	118,524,303	-
Total	1,109,024,844	1,109,024,844	-

ConocoPhillips sebagai operator lapangan Bayu Undan membayar minyak keuntungan atas nama perusahaan patungan, sedangkan setiap perusahaan membayar bagiannya Laba Minyak & Gas. ConocoPhillips membayar 54% dari total FTP dan minyak & gas keuntungan yang diterima oleh Autoridade Nacional do Petróleo pada tahun 2009.

Biaya Perusahaan

Sebuah daftar lengkap dari biaya yang dibayar oleh perusahaan dan diterima oleh Pemerintah pada tahun 2009 tercantum dalam Tabel 4.

Table 4 Fees 2009			US Dollars
Name of company	Paid by companies	Paid by Government	Difference
JPDA			
ConocoPhillips JPDA Pty Ltd TRS			
- Contract service fee	160,000	160,000	-
			-
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd			-
- Development fee	2,814,000	2,814,000	-
- Contract service fee	160,000	160,000	-
			-
ENI JPDA (06-105) (Revised)			-
- Development fee	250,000	250,000	-
- Contract service fee	160,000	160,000	-
			-
PC (Timor Sea 06-102) Ltd (Revised)			-
- Contract service fee	80,000	80,000	-
			-
Woodside Petroleum (Timor Sea 19) Pty Ltd			-
- Contract service fee	160,000	160,000	-
			-
Woodside Petroleum (Timor Sea 20) Pty Ltd			-
- Contract service fee	160,000	160,000	-
			-
MINZA OIL & GAS LIMITED			-
- Contract service fee	80,000	80,000	-
			-
Timor-Leste Exclusive Area:			
ENI TL SPA			-
- License fee/Surface fee	543,510	543,510	-
			-
Reliance Exploration & Production DMCC (Revised)			-
- License fee/Surface fee	77,480	77,480	-
Total	4,644,990	4,644,990	-

95% dari biaya yang diterima oleh Autoridade Nacional do Petróleo adalah dari JPDA, sementara 5% dari pendapatan tersebut berasal dari Area Eksklusif Timor-Leste. Kontrak layanan dan biaya pengembangan yang dipertahankan oleh ANP. Biaya Izin Kawasan Timor Leste Eksklusif dipindahkan ke Dana Minyak.

Perbedaan

Tidak ada perbedaan antara angka terakhir yang dilaporkan oleh Perusahaan dan Pemerintah untuk tahun 2009.

Ada perbedaan yang diidentifikasi pada saat kembali asli sebagaimana dilaporkan dalam Lampiran E. Perbedaan ini terjadi karena beberapa alasan termasuk:

- Penerimaan jumlah yang tidak benar dicatat oleh Perusahaan, NDPR dan ANP
- Penerimaan salah diklasifikasikan oleh Perusahaan, NDPR dan ANP
- Penerimaan dicatat dalam periode yang tidak benar oleh Perusahaan
- Penerimaan dicatat atas dasar akrual bukan secara tunai oleh Perusahaan

Setelah ketidaksesuaian diidentifikasi oleh Badan Agregasi, Badan ini meminta baik Perusahaan maupun NDPR atau ANP, tergantung pada apa manfaat pengaliran perbedaan timbul untuk menyelidiki. Badan agregasi menegaskan bahwa baik Perusahaan maupun NDPR atau ANP setuju pada jumlah akhir.

1.12 Rekonsiliasi Penerimaan dana minyak untuk Laporan EITI

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, laporan EITI disusun atas dasar yang berbeda untuk laporan keuangan Dana Minyak Bumi, maka rekonsiliasi telah disusun sebagai berikut:

Tabel 5

Reconciliation of receipts - Petroleum Fund and EITI			
Petroleum Receipts as reported in cashflow of Petroleum Fund Financial Statements			
Petroleum receipts		1,660,299,285	
Less: Taxation refunds		(110,970)	
Add: Interest received		167,294,658	1,827,482,973
Add: Receipts included in scope of EITI not paid to Petroleum Fund			
Development and contract service fees paid to the ANP		4,024,000	
Article 6.1 (b) Receipts			
Timing differences		5,070,713	
Amount paid to the Australian Government:			
- Total ANP receipts	1,113,669,834		
- Less: Development and contract service fees	4,024,000		
Net fees	1,109,645,834		
10% of Net fees paid to Australian Government		110,964,583	120,059,296
Deduct: Receipts excluded from scope of EITI received by Petroleum Fund			
Article 6.1 (a) Receipts			
Subcontractors taxes		(11,052,125)	
Article 6.1 (c) Receipts			
Interest		(167,294,658)	
Article 6.1 (e) Receipts			
Pipeline		(5,240,800)	
Interest receipts (net of bank charges) by the ANP		(64,691)	(183,652,274)
Petroleum receipts reported by in EITI			1,763,889,995

Laporan keuangan Dana Minyak yang diaudit sesuai dengan Standar Internasional tentang Auditing. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Laporan Keuangan Internasional.

2. Sejarah Terkini tentang EITI di Timor-Leste

Year	Detail
2002	Peluncuran global EITI
2003	Pemerintah Timor-Leste mengumumkan Komitmen untuk EITI
2004	Produksi dimulai di sumur minyak Bayu Undan
2005	Dana perminyakan Timor-Leste diciptakan
2006	Undanguan pemerintah untuk pembentukan Kelompok Kerja EITI
2007	Rapat pertama kelompok kerja EITI
2008	Menciptakan ANP
2008	Membentuk Sekretariat EITI
2009	Pedoman EITI diselesaikan oleh kelompok kerja EITI
2009	Laporan EITI pertama disiapkan untuk tahun akhir 31 Desember 2008
2010	Dewan menyetujui EITI Timor-Leste sebagai kompliant

LAMPIRAN A

Inisiatif Transparensi Industri Ekstraktif

Apakah EITI itu?

<http://www.eiti.org/eiti>

EITI menetapkan standar global untuk transparansi dalam minyak, gas dan pertambangan. Hal ini

Upaya untuk membuat sumber daya alam yang menguntungkan semua

3,5 milyar orang hidup di negara-negara kaya minyak, gas dan mineral. Dengan tata kelola yang baik eksploitasi sumber daya tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang besar untuk mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan. Namun, ketika pemerintahan lemah, hal itu dapat menyebabkan kemiskinan, korupsi, dan konflik. Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) bertujuan untuk memperkuat pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif.

EITI mendukung perbaikan tata kelola di negara-negara kaya sumber daya alam melalui verifikasi dan publikasi penuh pembayaran perusahaan dan pendapatan pemerintah dari minyak, gas dan pertambangan.

Sebuah koalisi pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil

EITI adalah koalisi pemerintah, perusahaan, kelompok masyarakat sipil, investor dan organisasi internasional. Hal ini tercermin tidak hanya dalam proses EITI di negara-negara yang melaksanakan EITI, tetapi juga pada tingkat internasional: Dewan EITI terdiri dari anggota dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil, dan ditunjuk di Konferensi. EITI Global dua-tahunan. Estruktur pemerintahan EITI saat ini adalah disahkan dalam Konferensi Global EITI terbaru di Doha, Feb 2009.

Sebuah standar bagi perusahaan untuk mempublikasikan apa yang mereka bayarkan dan bagi pemerintah untuk mengungkapkan apa yang mereka terima

EITI memiliki metodologi yang kokoh namun fleksibel yang menjamin standar global yang diterapkan di seluruh negara yang berbeda. Dewan EITI dan Sekretariat internasional adalah penjaga metodologi itu. Pelaksanaan itu sendiri, bagaimanapun, adalah tanggung jawab masing-masing negara. EITI, secara singkat, adalah standar global yang dikembangkan dan mempromosikan transparansi pendapatan di tingkat lokal. Peraturan EITI menetapkan metodologi yang perlu diikuti oleh negara untuk menjadi kompatibel sepenuhnya dengan EITI.

Prinsip-prinsip dan Kriteria EITI

Prinsip-prinsip dan kriteria EITI

www.eiti.org/eiti/principles

Apa yang sekarang dikenal sebagai proses EITI berevolusi dari pernyataan pertama dari Prinsip EITI pada Konferensi EITI pada tahun 2003. Metodologi validasi diselesaikan oleh Dewan EITI pada tahun 2007. Namun, Prinsip dan Kriteria EITI adalah pernyataan yang paling singkat dari kepercayaan dan tujuan Inisiatif. Keyakinan dan tujuan didukung oleh stakeholder EITI, pendukung dan pelaksana sama.

Prinsip-prinsip EITI

Prinsip-prinsip EITI, disetujui pada Konferensi Lancaster House pada bulan Juni 2003, memberikan landasan inisiatif. Mereka adalah:

1. Kami berbagi keyakinan bahwa penggunaan yang bijaksana dari kekayaan sumber daya alam harus menjadi mesin penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang negatif.
2. Kami menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan warga suatu negara berada dalam domain pemerintah berdaulat untuk dilaksanakan dalam kepentingan pembangunan nasional mereka.
3. Kami menyadari bahwa manfaat dari ekstraksi sumber daya terjadi sebagai arus pendapatan selama bertahun-tahun dan sangat tergantung pada harga.
4. Kami menyadari bahwa pemahaman publik dari pendapatan pemerintah dan pengeluaran dari waktu ke waktu dapat membantu debat publik dan menginformasikan pilihan opsi yang sesuai dan realistis untuk pembangunan berkelanjutan.
5. Kami menggarisbawahi pentingnya transparansi oleh pemerintah dan perusahaan dalam industri ekstraktif dan

kebutuhan untuk meningkatkan manajemen keuangan publik dan akuntabilitas.

6. Kami menyadari bahwa pencapaian transparansi yang lebih besar harus diletakkan dalam konteks menghormati kontrak dan undang-undang.
7. Kami menyadari peningkatan lingkungan untuk investasi langsung dalam negeri dan asing dapat membawa transparansi keuangan.
8. Kami percaya pada prinsip dan praktek akuntabilitas oleh pemerintah untuk semua warga negara untuk pengelolaan arus pendapatan dan belanja publik.
9. Kami berkomitmen untuk mendorong standar transparansi yang tinggi dan akuntabilitas dalam kehidupan publik, operasi pemerintah dan dalam bisnis.
10. Kami percaya bahwa pendekatan konsisten yang luas dan bisa diterapkan dengan pengungkapan pembayaran dan pendapatan diperlukan, yang sederhana untuk dilakukan dan digunakan.
11. Kami percaya bahwa pengungkapan pembayaran di suatu negara harus melibatkan semua perusahaan industri ekstraktif yang beroperasi di negara itu.
12. Dalam mencari penyelesaian, kami percaya bahwa semua stakeholder memiliki kontribusi penting dan relevan untuk membuat - termasuk pemerintah dan agen-agen mereka, perusahaan-perusahaan industri ekstraktif, perusahaan jasa, organisasi multilateral, lembaga keuangan, investor, dan organisasi non-pemerintah.

Kriteria EITI

Pelaksanaan EITI harus konsisten dengan kriteria di bawah ini:

1. Penerbitan reguler semua bahan minyak gas, dan pembayaran pertambangan oleh perusahaan kepada pemerintah ("pembayaran") dan pendapatan seluruh materi yang diterima oleh pemerintah dari perusahaan minyak, gas dan pertambangan ("pendapatan") ke khalayak luas dapat diakses publik, dan cara yang komprehensif.
2. Dimana audit tersebut belum ada, pembayaran dan pendapatan adalah subjek audit, kredibel independen, menerapkan standar audit internasional.
3. Pembayaran dan pendapatan yang didapatkan oleh administrator independen, kredibel, menerapkan standar audit internasional dan dengan publikasi opini administrator tentang rekonsiliasi termasuk perbedaan, apapun harus diidentifikasi.
4. Pendekatan ini diperluas ke semua perusahaan termasuk perusahaan milik negara.
5. Masyarakat sipil secara aktif terlibat sebagai peserta dalam pemantauan, desain dan evaluasi proses ini dan memberikan kontribusi terhadap debat publik.
6. Suatu rencana kerja mandiri, finansial Publik untuk semua hal di atas dikembangkan oleh pemerintah tuan rumah, dengan bantuan dari lembaga keuangan internasional jika diperlukan, termasuk target terukur, jadwal pelaksanaan, dan penilaian terhadap keterbatasan kapasitas potensial.

Validasi EITI

Validasi EITI

<http://eiti.org/eiti/validation>

Apakah validasi EITI itu?

Validasi adalah jaminan kualitas EITI's mekanisme dan fitur penting dari proses EITI. Hal ini memiliki dua fungsi penting. Pertama, mempromosikan dialog dan pembelajaran di tingkat Negara. Kedua, menjaga merek EITI dengan memegang semua Negara pelaksana: untuk standard global yang sama.

Validasi bukan audit. Ini tidak mengulangi pekerjaan pengungkapan dan rekonsiliasi yang dilakukan untuk laporan EITI. Validasi memiliki tujuan yang lebih luas: mengevaluasi pelaksanaan EITI dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan, memverifikasi prestasi dengan mengacu pada standar global EITI, dan mengidentifikasi peluang untuk memperkuat proses kemajuan EITI.

Validasi juga merupakan mekanisme dewan EITI untuk menentukan negara calon atau status kompliant. Saat ini ada 28 Calon negara. Negara-negara ini telah memenuhi empat indikator "sign-up" dan berada pada tingkat yang berbeda dalam implementasi EITI. EITI mensyaratkan bahwa Validasi Calon selesai dalam waktu dua tahun untuk menilai apakah mereka telah mencapai Kepatuhan EITI.

Melalui Validasi, negara-negara yang menunjukkan kepatuhan mereka dengan EITI (atau menunjukkan kemajuan substantif untuk mencapai tujuan ini) menerima pengakuan internasional atas upaya dan prestasi. Validasi Jika tidak selesai, atau jika validasi menunjukkan bahwa belum ada kemajuan yang berarti terhadap pencapaian Kepatuhan EITI, Dewan EITI akan mencabut status negara Calon itu. Untuk informasi lebih lanjut tentang aturan yang berkaitan dengan batas waktu 2 tahun.

Sekretariat EITI saat ini bekerja dengan semua negara Calon untuk memberikan dukungan dan membangun kesadaran tentang pentingnya Validasi.

Bagaimana Validasi Bekerja?

Proses Validasi ini dilakukan pada tingkat nasional dan diawasi oleh kelompok multi-stakeholder nasional. Metodologi Validasi diatur dalam Peraturan EITI.

Langkah pertama adalah pengangkatan Validator oleh kelompok multi-stakeholder. Dewan EITI menyetujui daftar Validator EITI yang telah terakreditasi, dan telah menerbitkan pedoman untuk negara pelaksana tentang bagaimana mendapatkan sebuah Validator.

Para Validator terseleksi akan menggunakan tiga dokumen kunci untuk mendukung pekerjaan mereka. yaitu:

- Rencana Kerja Nasional
- Kisi-kisi Validasi dan Indikator alat penilaian; dan
- Bentuk Perusahaan

Dengan menggunakan dokumen-dokumen ini, Validator bertemu dengan kelompok berbagai pihak, organisasi dikontrak untuk menyatukan angka yang diungkapkan oleh perusahaan, pemerintah dan pihak-pihak kunci lainnya (termasuk perusahaan dan masyarakat sipil tidak pada kelompok multi-stakeholder).

Menggunakan informasi ini, Validator melengkapi suatu laporan, terdiri dari:

- Sebuah laporan narasi singkat tentang kemajuan terhadap Rencana Kerja Nasional.
- Sebuah laporan narasi singkat tentang kemajuan terhadap indikator di dalam kisi-kisi Validasi
- Kisi-kisi Validasi lengkap
- Sebuah laporan naratif tentang pelaksanaan perusahaan
- Menyusun Format Perusahaan
- Penilaian menyeluruh tentang pelaksanaan EITI: adalah negara kandidat, sesuai atau tidak ada kemajuan yang berarti.

Laporan ini pada awalnya ditujukan untuk kelompok multi-stakeholder, pemerintah dan Dewan EITI. Jika kelompok-kelompok ini puas dengan Laporan Validasi, diterbitkan serta diberi kesimpulan dan saran. Jika ada ketidaksepakatan mengenai proses validasi, maka akan segera dibahas secara lokal, dengan Dewan EITI hanya dipanggil untuk membantu dalam kasus-kasus sengketa yang serius.

Untuk informasi lebih lanjut tentang EITI dan EITI Timor-Leste:

<http://www.eiti.org/eiti>

<http://www.eiti.org/TimorLeste>

<http://www.eiti.org/news-events/Timor-Leste-designated-eiti-kompliant-eiti-board>

LAMPIRAN B – Validasi EITI Timor-Leste

Penilaian Umum
Laporan Validasi EITI



3.PENILAIAN UMUM

Validasi (EITI) Timor-Leste

PENILAIAN UMUM

Timor-Leste memutuskan untuk mendapat transparansi industri ekstraktif tak lama setelah mencapai kemerdekaan penuh, dan mengembangkan suatu sistem canggih untuk memantau dan menerima pendapatan minyak bumi. Akan ditransfer semua pendapatan tersebut (kecuali untuk manajemen dan biaya pemasaran relatif kecil) langsung ke Dana Minyak. Timor-Leste juga telah membentuk Penghasilan Benchmark untuk penarikan Dana Minyak Bumi, agar menjaga dana untuk generasi mendatang. Benchmark ini untuk sebagian besar telah diikuti: Baik Dana Perminyakan dan ANP telah diaudit oleh akuntan publik internasional dari awal. Singkatnya, transparansi di sektor minyak dan gas adalah tepat di Timor-Leste.

Proses EITI di Timor-Leste sekarang juga membuktikan bahwa jumlah perusahaan dan pemerintah dapat disejajarkan. Ini adalah latihan baru yang menunjukkan bentuk baru akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan minyak dan gas, yang kita anggap penting dalam dirinya sendiri, karena menyediakan kredibilitas lebih lanjut untuk sebuah sistem Yang sudah-kuat.

Kami percaya bahwa –proses EITI tersebut semakin mengukuhkan dan memberikan kontribusi untuk dukungan luas dan tahan lama untuk transparansi di sektor minyak bumi di Timor-Leste.

Sebagai Validator dari proses EITI di Timor-Leste, kami senang untuk mengkonfirmasi penilaian kita bahwa Timor-Leste telah memenuhi semua indikator yang terkandung dalam Panduan Validasi dan selain itu, proses ini konsisten dengan Prinsip dan Kriteria EITI.



LAPORAN BADAN AGREGASI -

Kompilasi Laporan dan Pernyataan Rekonsiliasi

31 Desember 2009

Contents

Kompilasi Laporan Badan Agregasi
Pernyataan Rekonsiliasi

Laporan Kompilasi Badan Agregasi

**Kompilasi Laporan kepada Menteri Keuangan
Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste
sehubungan dengan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif untuk
tahun yang berakhir 31 Desember 2009**

Berdasarkan informasi yang diberikan kepada kita oleh Pemerintah atau Perusahaan ekstraktif ("pihak-pihak pelaporan"), kami telah mengumpulkan, sesuai dengan Standar Internasional tentang Layanan terkait yang berlaku untuk keterlibatan kompilasi, terlampir pada Lampiran A sampai E untuk menyatukan pembayaran dan pendapatan yang dilaporkan kepada kami oleh pihak pelapor untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009

Informasi yang diberikan kepada kami awalnya dalam bentuk template dibuat oleh para pihak pelapor, disusun dalam format sebagaimana diatur di dalam Pedoman Penyusunan Laporan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI), Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste untuk dilaporkan kepada badan agregasi EITI, diterbitkan dalam bulan Maret 2009 ("Pedoman"). Informasi tambahan diberikan, oleh pihak pelapor yang relevan, di mana item rekonsiliasi diidentifikasi. Para pihak pelaporan bertanggung jawab atas informasi yang terkandung dalam Lampiran A sampai E. Karena ini adalah Kompilasi Laporan, kami tidak menyatakan pernyataan review atau opini audit padanya.

Deloitte Touche Tohmatsu

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Chartered Accountant
Darwin
9 December 2010

Lampiran Rekonsiliasi

Terlampir Lampiran A-E

EITI Timor-Leste
Ringkasan Rekonsiliasi
Jumlah yang dilaporkan seperti dibayar oleh Perusahaan Ekstraktif (Model Pedoman I)
Pada
Jumlah yang dilaporkan seperti yang diterima oleh Pemerintah Timor-Leste (per Model Pedoman)
untuk akhir tahun 31 Desember 2009

Total for all Companies	Appendix	Amounts reported a paid by Companies-template 1			Amounts reported as received by the Government of Timor-Leste (per guidelines Templates)			Difference	
		Cash US\$	Kind		Cash US\$	Kind		Cash US\$	Kind
			Value US\$	Description		Value US\$	Description		Value US\$
Petroleum Tax	B	650,220,161	-		650,220,161	-		-	-
FTP/ Royalties / Profit Oil & Gas	C	1,109,024,844	-		1,109,024,844	-		-	-
JPDA Fee:									
- Application fee	D	-	-		-	-		-	-
- Seismic data fee	D	-	-		-	-		-	-
- Development fee	D	3,064,000	-		3,064,000	-		-	-
- Contract Service fee	D	960,000	-		960,000	-		-	-
Timor-Leste Exclusive Area:									
- Application fee	D	-	-		-	-		-	-
- Seismic data fee	D	-	-		-	-		-	-
- Licence fee/Surface fee	D	620,990	-		620,990	-		-	-
		1,763,889,995	-		1,763,889,995	-		-	-

Rekonsiliasi Industri Ekstraktif Transparansi Inisiatif Timor-Leste
tentang laporan
Pajak minyak bumi dilaporkan sebagaimana yang dibayar oleh Perusahaan-Perusahaan Ekstraktif (Model
Pedoman 1 Bagian 2 a)
kepada
pajak minyak bumi dilaporkan sebagaimana yang diterima oleh Direktorat pajak-Model 2 (Pedoman Template 2)
Untuk akhir tahun 31 Desember 2009

Name of Company	Petroleum Taxes reported as paid by Companies- Template 1 (Section 2a)			Petroleum Taxes reported as received by the Petroleum Tax Directorate- Template 2			Diference	
	Cash US\$	Kind		Cash US\$	Kind		Cash US\$	Kind
		Value US\$	Description		Value US\$	Description		Value US\$
ConocoPhilips (Emet) Pty Ltd (Revised)	5,639,213	-		5,639,213	-		-	-
ConocoPhilips JPDA Pty Ltd	85,230,527	-		85,230,527	-		-	-
ConocoPhilips (03-13) Pty Ltd	28,957,881	-		28,957,881	-		-	-
ConocoPhilips (03-12) Pty Ltd	185,400,285	-		185,400,285	-		-	-
ConocoPhilips (Timor Sea) Pty Ltd	47,971,847	-		47,971,847	-		-	-
ConocoPhilips (03-19) Pty Ltd (Revised)	4,480	-		4,480	-		-	-
ConocoPhilips (03-20) Pty Ltd	-	-		-	-		-	-
PC (Timor Sea 06-102) Ltd (Revised)	3,595,515	-		3,595,515	-		-	-
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	72,185,360	-		72,185,360	-		-	-
Eni JPDA 03-13 Limited	74,673,381	-		74,673,381	-		-	-
Eni Timor-Leste S.P.A (PSC 1-5)	113,848	-		113,848	-		-	-
Eni JPDA 06-105 PTY LTD (Revised)	1,884,719	-		1,884,719	-		-	-
MINZA OIL & GAS LIMITED	95,684	-		95,684	-		-	-
Oilex (JPDA 06-103) Ltd (Revised)	10,563	-		10,563	-		-	-
Tokyo Timor Sea Resource Pty Ltd	64,650,319	-		64,650,319	-		-	-
Impex Sahul Co. Ltd (Revised)	77,143,602	-		77,143,602	-		-	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 19) Pty Ltd (Revised)	1,324,023	-		1,324,023	-		-	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 20) Pty Ltd (Revised)	6,245	-		6,245	-		-	-
Reliance Exploration & Production DMCC (Revised)	1,332,669	-		1,332,669	-		-	-
Total	650,220,161	-		650,220,161	-		-	-

EITI Timor-Leste
Rekonsiliasi tentang
First Tranche Petroleum/ Royalti dan laba Minyak & Gas dilaporkan seperti yang dibayarkan oleh perusahaan-
perusahaan ekstraktif
(Pedoman Template 1 bagian 2 b i & ii)
untuk
First Tranche Petroleum / royalti dan laba Minyak dan Gas dilaporkan seperti yang diterima oleh Autoridade
Nacional do Petróleo
Untuk akhir tahun 31 Desember 2009

Name of Company	The First Tranche Petroleum / Royalties and Profit Oil & Gas reported as paid by Companies – Template 1 (Section 2b i & ii)			The First Tranche Petroleum / Royalties and Profit Oil & Gas as received by the National Petroleum Authority – Template 3			Difference	
	Cash US\$	Kind		Cash US\$	Kind		Cash US\$	Kind
		Value US\$	Description		Value US\$	Description		Value US\$
ConocoPhillips (Emet) Pty Ltd	8,852,230	-		8,852,230	-		-	-
ConocoPhillips JPDA Pty Ltd	151,021,834	-		151,021,834	-		-	-
ConocoPhillips (03-13) Pty Ltd	52,862,834	-		52,862,834	-		-	-
ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd	396,072,797	-		396,072,797	-		-	-
ConocoPhillips (Timor Sea) Pty Ltd	75,055,944	-		75,055,944	-		-	-
Conoco Phillips (03-19) Pty Ltd	-	-		-	-		-	-
Conoco Phillips (03-20) Pty Ltd	-	-		-	-		-	-
Eni JPDA 03-13 Limited	108,227,122	-		108,227,122	-		-	-
Eni JPDA 06-105 PTY LTD	-	-		-	-		-	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 19) Pty Ltd	-	-		-	-		-	-
Woodside Petroleum (Timor Sea 20) Pty Ltd	-	-		-	-		-	-
PC (Timor Sea 06-102) Ltd	-	-		-	-		-	-
Santos JPDA (91-12) Pty Ltd	107,794,679	-		107,794,679	-		-	-
Eni Timor - Leste S.P.A (PSC 1-5)	-	-		-	-		-	-
MINZA OIL & GAS LIMITED	-	-		-	-		-	-
Oilex (JPDA 06-103) Ltd	-	-		-	-		-	-
Tokyo Timor Sea Resource Pty Ltd	90,613,101	-		90,613,101	-		-	-
Inpex Sahul Co. Ltd (Revised)	118,524,303	-		118,524,303	-		-	-
Reliance Exploration & Production DMCC	-	-		-	-		-	-
Total	1,109,024,844	-		1,109,024,844	-		-	-

Industri Ekstraktif Transparansi Inisiatif Timor-Leste
tentang pembayaran lain, dilaporkan seperti yang dibayarkan oleh Perusahaan Ekstraktif
(Pedoman Template 1 Bagian 2 b iii)
melaporkan pembayaran lain yang diterima oleh Autoridade Nacional do Petróleo (Pedoman
Template 3)
Untuk akhir tahun 31 Desember 2009

Total for all Companies	Other payments reported as paid by Companies-Template 1 (Section 2b iii)			Other payments reported as received by the National Petroleum Authority			Difference	
	Cash US\$	Kind		Cash US\$	Kind		Cash US\$	Kind
		Value US\$	Description		Value US\$	Description		Value US\$

ConocoPhillips JPDA Pty Ltd TRS

JPDA Fee:

- Application fee	-	-		-	-		-	-
- Seismic data fee	-	-		-	-		-	-
- Development fee	-	-		-	-		-	-
- Contract Service fee	160,000	-		160,000	-		-	-

Timor-Leste Exclusive Area :

- Application fee	-	-		-	-		-	-
- Seismic data fee	-	-		-	-		-	-
- License fee / Surface fee	-	-		-	-		-	-

ConocoPhillips (03-12) Pty Ltd

JPDA Fee

- Application fee	-	-		-	-		-	-
- Seismic data fee	-	-		-	-		-	-
- Development fee	2,814,000	-		2,814,000	-		-	-
- Contract Service fee	160,000	-		160,000	-		-	-

Timor-Leste Exclusive Area :

- Application fee	-	-		-	-		-	-
- Seismic data fee	-	-		-	-		-	-
- License fee / Surface fee	-	-		-	-		-	-

Eni JPDA (06-105)

JPDA Fee

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- Development fee	250,000	-	250,000	-	-	-
- Contract Service fee	160,000	-	160,000	-	-	-

Timor-Leste Exclusive Area :

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- License fee / Surface fee	-	-	-	-	-	-

Eni TL SPA

JPDA Fee

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- Development fee	-	-	-	-	-	-
- Contract Service fee	-	-	-	-	-	-

Timor-Leste Exclusive Area :

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- License fee / Surface fee	543,510	-	543,510	-	-	-

PC (Timor Sea 06-102) Ltd (Revised)

JPDA Fee

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- Development fee	-	-	-	-	-	-
- Contract Service fee	80,000	-	80,000	-	-	-

Timor-Leste Exclusive Area :

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- License fee / Surface fee	-	-	-	-	-	-

Reliance Exploration & Production DMCC**(Revised)**

JPDA Fee

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- Development fee	-	-	-	-	-	-
- Contract Service fee	-	-	-	-	-	-
Timor-Leste Exclusive Area :						
- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- License fee / Surface fee	77,480	-	77,480	-	-	-

Woodside Petroleum (Timor Sea 19) Pty Ltd

JPDA Fee

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- Development fee	-	-	-	-	-	-
- Contract Service fee	160,000	-	160,000	-	-	-
Timor-Leste Exclusive Area :						
- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- License fee / Surface fee	-	-	-	-	-	-

Woodside Petroleum (Timor Sea 20) Pty Ltd

JPDA Fee

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- Development fee	-	-	-	-	-	-
- Contract Service fee	160,000	-	160,000	-	-	-
Timor-Leste Exclusive Area:						
- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- License fee / Surface fee	-	-	-	-	-	-

MINZA OIL & GAS LIMITED

JPDA Fee

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- Development fee	-	-	-	-	-	-
- Contract Service fee	80,000	-	80,000	-	-	-

Timor-Leste Exclusive Area :

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- License fee / Surface fee	-	-	-	-	-	-

TOTAL

JPDA Fee

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- Development fee	3,064.000	-	3,064.000	-	-	-
- Contract Service fee	960,000	-	960,000	-	-	-

Timor-Leste Exclusive Area :

- Application fee	-	-	-	-	-	-
- Seismic data fee	-	-	-	-	-	-
- License fee / Surface fee	620,990	-	620,990	-	-	-

Total	4,644.990	-	4,644.990	-	-	-
--------------	------------------	----------	------------------	----------	----------	----------

Rangkuman Rekonsiliasi Industri Ekstraktif Transparansi Inisiatif Timor-Leste
tentang angka laporan asli
terhadap
angka laporan final
untuk akhir tahun 31 Desember 2009

Summary Description of Payment	Per Companies			Per Government		
	Original US\$	Adjustments US\$	Final US\$	Original US\$	Adjustments US\$	Final US\$
1. Benefit Stream be reported by International Companies only	0	0	0	0	0	0
1 a) National State-Owned/ Joint Venture Company equity share of Host Government Production	0	0	0	0	0	0
1 b) Production received by National State-Owned/ Joint Venture Company	0	0	0	0	0	0
1 c) National State-Owned/ Joint Venture Company production entitlement	0	0	0	0	0	0
1 d) Production entitlement received on behalf of the Host Government	0	0	0	0	0	0
2. Payments to Host Government						
2 a) Petroleum Tax Department	649,422,368	797,794	650,220,161	650,223,322	-3,161	650,220,161
i) Income tax payments	280,337,646	1,000,000	281,337,646	280,022,974	1,314,672	281,337,646
ii) Additional profits tax payments/Supplemental Petroleum Tax payments	341,914,480	0	341,914,480	343,229,152	-1,314,672	341,914,480
iii) Branch profits tax payments	0	0	0	0	0	0
iv) VAT payments	15,315,110	-173,196	15,141,914	15,141,914	0	15,141,914
v) With Holding Tax payments	7,125,210	-24,130	7,101,079	7,118,970	-17,890	7,101,079
vi) Wages Tax	4,619,678	-4,881	4,614,798	4,600,069	14,729	4,614,798
vii) Penalty/ Interest	110,244	0	110,244	110,244	0	110,244
viii) Other Payments	0	0	0	0	0	0
2 b) National Petroleum Authority						
* For the purpose of the returns, all payments made by Extractive Industries to the National Petroleum Authority are regarded as payments made to the Government of Timor Leste	1,094,011,964	19,657,870	1,113,669,834	1,113,426,174	243,660	1,113,669,834
i) First Tranche Petroleum Payments (FTP)						
- Condensate	54,101,146	0	54,101,146	54,101,146	0	54,101,146
- Liquefied Petroleum Gas	21,716,835	0	21,716,835	21,716,835	0	21,716,835
- Gas	63,589,365	191,528	63,780,893	63,780,893	0	63,780,893
ii) Profit oil & gas payments	949,879,628	19,546,342	969,425,970	969,425,970	0	969,425,970
iii) Other Payments:	0	0	0	0	0	0
JPDA Fee:						
- Application fee	0	0	0	0	0	0
- Seismic data fee	0	0	0	0	0	0
- Development fee	3,064,000	0	3,064,000	3,064,000	0	3,064,000
- Contract service fee	720,000	240,000	960,000	960,000	0	960,000
Timor Leste Exclusive Area:						
- Application fee	0	0	0	0	0	0
- Seismic data fee	0	0	0	0	0	0
- License fee/Surface fee	940,990	-320,000	620,990	377,330	243,660	620,990
2c. Other	0	0	0	0	0	0
a) Other payments to Government/ Person	0	0	0	0	0	0
Government agency/ National State-Owned/ Joint Venture Company name:	0	0	0	0	0	0
Government agency/ National State-Owned/ Joint Venture Company Representative name:	0	0	0	0	0	0
Payment description:	0	0	0	0	0	0
4. Total						
Total Payments	1,743,434,332	20,455,663	1,763,889,995	1,763,649,496	240,499	1,763,889,995

Note:

As disclosed on page 16 of the EITI Working Group Report, adjustments made to original returns occurred because:

- Receipt amount incorrectly recorded by Companies, NDPR and ANP
- Receipts incorrectly classified by Companies, NDPR and ANP
- Receipts recorded in the incorrect period by a Company
- Receipts recorded on an accruals basis rather than on a cash basis by a Company